

PENDAMPINGAN PENGUATAN MANAJEMEN ORGANISASI DAN PENGEMBANGAN ASSET BKM MELALUI PENERAPAN MODEL PEMBERDAYAAN BERBASIS PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL

Muhamad Abdul Roziq Asrori

STKIP PGRI Tulungagungroziq@stkipgritulungagung.ac.id**ABSTRAK**

Pendampingan ini bertujuan membantu relawan BKM mampu meningkatkan mutu organisasi dan mengembangkan asset pemberdayaan supaya program kerja menjadi lebih terarah serta assetnya bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan menerapkan model pemberdayaan berbasis persepsi dan partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan pertama; melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan BKM dan pemerintah desa terkait dengan model pemberdayaan berbasis swadaya dan partisipasi masyarakat untuk menyatukan mental dan visi pemberdayaan. Kedua; proses pelatihan mengusung dua pelatihan dasar yakni manajemen mutu organisasi dan pengembangan ekonomi kreatif untuk kelangsungan asset dana yang ada. Ketiga; adalah melakukan pembinaan pemberdayaan dan sosialisasi pada warga tentang model implementasi pemberdayaan, BKM dan Perangkat menyusun perencanaan pembangunan dengan sasaran hasil kesepakatan secara musyawarah oleh masyarakat, mengevaluasi program sekaligus mencari solusi untuk pengembangan program berikutnya. Keempat; membuat web sebagai media publikasi, informasi, dan transparansi kegiatan pemberdayaan. Hasil pemberdayaan berupa peningkatan pemahaman berorganisasi dan pengembangan program untuk keberlangsungan asset pemberdayaan. Pengembangan pelatihan menghasilkan system baru pengembangan asset BKM melalui "kambing gulir" dan "gruduk masal" pada KSM penunggak. Budaya partisipasi dan mutu organisasi dikembangkan sebuah pendekatan "nek kanane" bagian kearifan local masyarakat. Jaringan komunikasi dan akses masyarakat difasilitasi dengan system informasi BKM-KOTAKU.

Kata Kunci : BKM Wahana sejahtera, Kearifan Lokal, Partisipatif, PNPM-MP

ABSTRACT

This empowerment aims to help BKM volunteers be able to improve the quality of the organization and develop empowerment assets so that work programs become more focused and existing assets can develop according to the needs of implementing empowerment models based on perceptions and participation. The method used is first; conducting socialization and coordination with BKM and village government in relation to self-help based empowerment models and community participation to unite mental and empowerment visions. Second; training processes carry two basic pieces of training, namely the quality management of the organization and the development of a creative economy for the continuation of existing asset funds. Third; is to provide guidance on empowerment and socialization to the citizens about the implementation model of empowerment, BKM, and the Toolkit to develop development plans with the goal of consensus deliberation by the community, evaluating the program while seeking solutions for the development of the next program. Fourth, make the web as a medium of publication, information, and transparency of empowerment activities. Empowerment results in the form of increased organizational understanding and program development for the sustainability of asset empowerment. Development of training resulted in a new system of BKM asset development through rolling goat program and come en masse at KSM arrears. Participation culture and organizational quality are developed by a "Nek Kanane" approach to

the local wisdom of the community. Communication networks and community access are facilitated with the BKM-KOTAKU information system.

Keywords:BKM Wahana Sejahtera, Local wisdom, Participatory, PNPM-MP

Articel Received: 30/08/2020; **Accepted:** 09/01/2021

How to cite: Asrori, M. A. R. (2021). Pendampingan penguatan manajemen organisasi dan pengembangan asset bkm melalui penerapan model pemberdayaan berbasis persepsi dan partisipasi masyarakat lokal. *Abdimas Siliwangi*, Vol 04 (01), 103-114. doi: <http://dx.doi.org/10.22460/as.v4i1p%25p.5394>

A. PENDAHULUAN

Terbitnya undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa secara tidak langsung telah merubah pola pemberdayaan yang ada di masyarakat desa. Kultur pemberdayaan yang menuntut partisipasi masyarakat mengalami transformasi dengan hanya melibatkannya pada saat perencanaan pembangunan. Bersamaan dengan itu berimbas pada berkurangnya kepedulian warga dengan proses pembangunan yang berlangsung di masyarakat baik infrastruktur maupun pembangunan sosial dan ekonomi.

Saat ini pengelolaan pembangunan masyarakat desa dibebankan kembali ke pada pemerintah desa. Sebelumnya persoalan pemberdayaan pemerintah desa harus bermitra dengan Badan keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai salah satu organisasi yang yang bertanggungjawab atas keterlaksanaan pemberdayaan di desa pada pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) berlangsung. Hingga saat ini program tersebut telah bermutasi menjadi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).

Isu perubahan pola pemberdayaan yang selama ini telah terlaksana dengan baik, menjadi polemik dimasyarakat dan berdampak pada menurunnya stabilitas keberlangsungan program kegiatan di BKM. Terutama yang sangat terasa adalah macetnya pengembalian dana pinjaman di Unit Pengelola Keuangan (UPK) sebagai salah satu unit usaha di bawah kendali BKM. Sebab meskipun program tidak lagi mendapat pendanaan dari pemerintah seperti tahun-tahun sebelumnya, asset ekonomi bergulir yang dikelola UPK BKM harus tetap berjalan. Saat ini rata-rata asset setiap desa lebih dari 300 juta.

Rumor yang beredar di masyarakat asset tridaya PNPM-MP akan dimarger dengan BUMDES. Sehingga menimbulkan kegalauan pada PKBKM selaku pelaksana system

organisasi yang ada di PNPM-MP ini. Dampak langsungnya adalah semakin meningkatnya angka kemacetan pengembalian pinjaman KSM karena persepsi PNPM-MP telah berakhir sehingga tidak perlu mengembalikan dana pinjaman.

Tentunya persoalan tersebut memerlukan penanganan untuk mengembalikan persepsi masyarakat agar kembali berpartisipasi pada pemberdayaan masyarakat berbasis partisipatif terutama untuk membangun daerah di mana mereka berada, baik dengan adanya dana dari pemerintah maupun harus dikelola secara swadaya. Berdasarkan persoalan tersebut dilakukan pemberdayaan masyarakat berbasis persepsi dan partisipasi masyarakat lokal.

B. LANDASAN TEORI

Memberdayakan masyarakat tentunya memerlukan sentuhan partisipasi masyarakat secara langsung. Dua hal yang perlu diperjelas dalam pemberdayaan, yakni makna keberdayaan dan pemberdayaan masyarakat. Secara kolektif masyarakat perlu diberdayaan melalui usaha, akumulasi pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki serta sumber lain yang ada untuk mencapai tujuan tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal (Asrori, 2018).

Memberdayakan masyarakat merupakan upaya dalam meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat untuk bisa melepaskan diri dari keterpurukan, kemiskinan dan keterbelakangan. Memberdayakan juga bisa dipahami sebagai usaha memampukan dan memandirikan masyarakat dengan memotivasi agar terjadi perubahan kompetensi pada individu dan masyarakat

Pembangunan partisipatif harus tumbuh berkembang dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Karena memang secara kultur masyarakat desa dan kota sangat berbeda sehingga memerlukan perlakuan yang tidak sama, bahkan antar desa juga. (Adisasmita, 2013; Rahayu & Budi, 2010). Termasuk dalam mengembangkan masyarakat melalui program KOTAKU yang saat ini membutuhkan kerelawanan dan swadaya masyarakat yang konsisten.

Konsep pemberdayaan yang baik tentu tidak menjadikan masyarakat sebagai objek proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri

(Sairin, 2002), yang tentu berimbang pada; Pertama, berkurangnya jumlah penduduk miskin. Kedua, berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Ketiga, meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya. Keempat, meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok serta makin luasnya interaksi kelompok lain di dalam masyarakat. Kelima, meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasar.

(Tri Winarni, 1998) memberikan rambu-rambu dalam pemberdayaan harus melakukan tahapan yang benar yakni diawali dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberdayaan, selanjutnya bisa dilakukan penguatan kapasitas masyarakat, dan yang terakhir adalah pendayaan. Oleh (Siswanto, 2016) diperjelas lagi harus mengurangi konflik terselubung dalam masyarakat dan memudahkan akses pengelolaan pemberdayaan. Pemikiran tersebut bisa menguatkan pendahulunya (Chambers, 1995), yang menjelaskan paradigm pembangunan harus mengarah pada *people centered, partisipatory, empowering, and sustainable*.

Menciptakan efektifitas pemberdayaan diperlukan pemahaman yang konprehensif terhadap unsur-unsur yang harus ada dalam pelaksanaan pemberdayaan, yang oleh (Siswanto, 2016) disebutkan dengan “inklusi dan partisipasi”. indikator yang bisa digunakan a) siapa yang diberdayakan, b) bagaimana mereka diberdayakan, c) peran apa yang dimainkan, d) bagaimana ruang partisipasinya. Selanjutnya “akses dan informasi”. Proses pemberdayaan memerlukan aliran informasi yang tidak boleh tersumbat dari berbagai lini antar masyarakat, pemerintah, dan lainnya. Hal ini bisa memudahkan untuk para pemangku kepentingan terlebih masyarakat guna mendapatkan berbagai peluang meningkatkan taraf hidup, seperti informasi berkaitan pendidikan, program-program pelatihan, hak dan kewajiban, dan juga peluang pasar yang sesuai dan lainnya. Unsur “kapasitas organisasi lokal” juga menjadi penting. Untuk mendapatkan penguatan dan respon yang baik harus ada kemampuan untuk

mengorganisir potensi lokal, karena dari mereka ini keberlanjutan program bisa diandalkan. Unsur lain yang penting yakni “Profesionalitas” pelaku pemberdaya. Kemampuan para relawan dalam memahami, mendengarkan, mendemonstrasi, melakukan tindakan, dan bertanggungjawab atas kebijakan yang ada menjadi penentu ketepatan perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan pada sasaran pemberdayaan.

C. METODE PELAKSANAAN

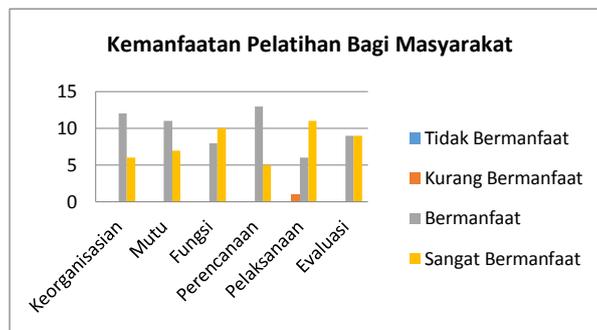
Untuk mendapatkan hasil yang optimal, pengabdian ini menggunakan 4 langkah tahapan. Pertama; melakukan koordinasi dengan BKM dan pemerintah desa untuk sosialisasi terkait model pemberdayaan yang digunakan untuk kelangsungan proses pemberdayaan berbasis partisipasi masyarakat lokal. Kedua; memberikan 2 pelatihan dasar tentang manajemen mutu organisasi dan pengembangan ekonomi kreatif. Hal ini untuk membekali masyarakat dalam melangsungkan reorganisasi dan manajemen asset dana yang ada. Ketiga adalah memberikan pembinaan pemberdayaan pada warga tentang model pemberdayaan yang dilakukan. Bersama BKM dan Perangkat desa disusun perencanaan pembangunan dengan sasaran hasil kesepakatan secara musyawarah oleh masyarakat, mengevaluasi program sekaligus mencari solusi untuk pengembangan program berikutnya. Keempat membuat web sebagai media publikasi, informasi, dan transparansi keseluruhan kegiatan pemberdayaan oleh BKM.

Pengabdian dilakukan di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung yakni desa Pulotondo. Desa tersebut dipilih karena memiliki karakteristik unik dalam hal pemanfaatan kearifan local untuk mengembangkan partisipasi warga agar tetap bisa eksis dalam menjalankan program pemberdayaan desa. Mitra pengabdian ini adalah BKM Wahana Sejahtera desa Pulotondo. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan melihat output dari kegiatan dan juga pemberian angket pemahaman masyarakat pasca pelatihan. Data disajikan secara deskriptif kuantitatif dengan paparan yang singkat dan jelas

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

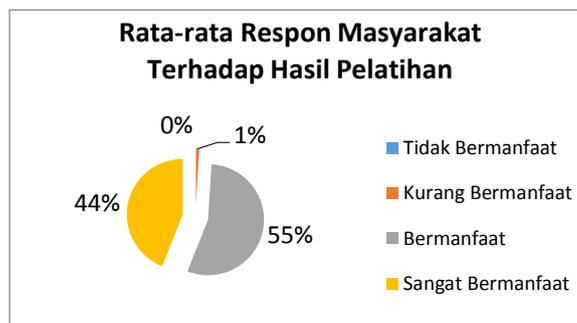
Tahapan awal pemberdayaan mendapatkan respon yang baik oleh mitra, bahkan diwujudkan dalam kesepakatan MoU kerjasama pada kedua belah pihak untuk saling bersinergi dalam proses pemberdayaan. Terlebih dalam hal pemanfaatan teknologi

informasi sebagai pengembangan pemenuhan akses informasi pada masyarakat. Hasil pelatihan menunjukkan kepuasan dari warga yang dipilih sebagai responden dengan tingkat kepuasan yang variatif pada pendampingan mutu organisasi dan perencanaan program dan juga pada pengembangan asset dan peningkatan partisipasi masyarakat. Berikut data informasi berkaitan kepuasan pendampingan pasca pelatihan pada mitra BKM Wahana Sejahtera disajikan dalam bentuk *bar chart* berikut:



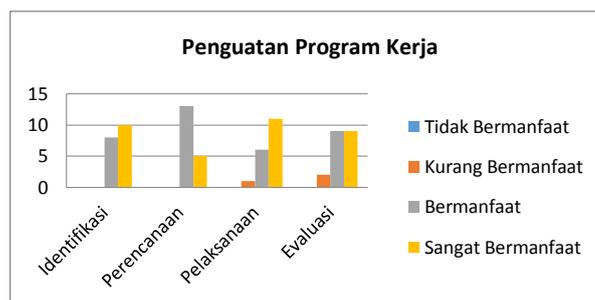
Gambar 1. Rincian Kemanfaatan Pelatihan Pemahaman keorganisasian
Sumber: data Pengabdian Masyarakat tahun 2018

Rata-rata kepuasan masyarakat terhadap pendampingan bisa dilihat pada pie chart berikut:



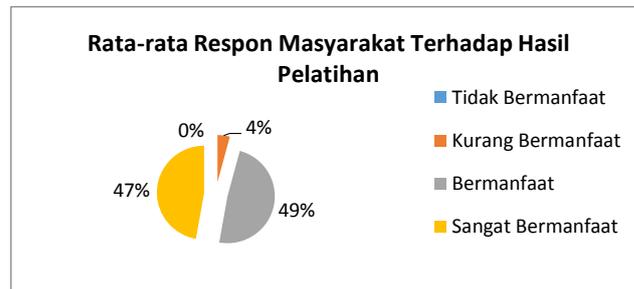
Gambar 2 Persentase Kemanfaatan Pelatihan Mutu Organisasi dan Perencanaan Program
Sumber: Data Pengabdian Masyarakat tahun 2018

Untuk meningkatkan mutu organisasi dan kinerja yang baik dilakukan pendampingan dengan mengusung pelatihan penguatan program kerja prioritas unggulan. Hasil bisa disajikan dalam barchart berikut:



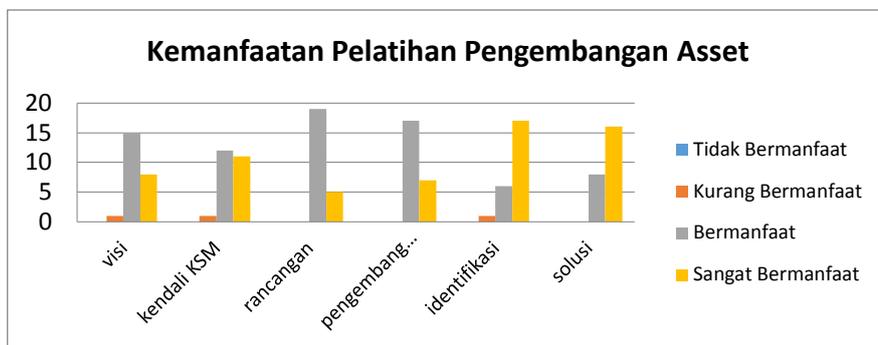
Gambar 3. Rincian Kemanfaatan Pelatihan penguatan program kerja

Rata rata kepuasan kebermanfaatn dari pendampingan ini menunjukkan angka berikut:



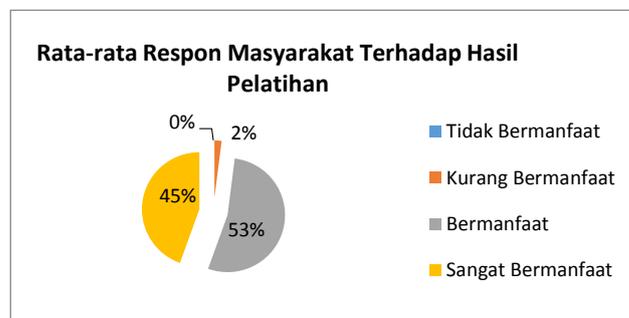
Gambar 4. Persentase Kemanfaatan Pelatihan penguatan Program kerja
 Sumber: Data Pengabdian Masyarakat tahun 2018

Berikut data informasi berkaitan kepuasan pendampingan pasca pelatihan pada mitra BKM Wahana Sejahtera disajikan dalam bentuk grafik *bar chart* berikut:



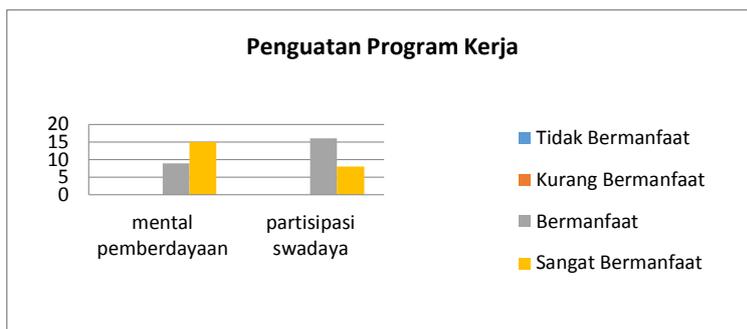
Gambar 5. Kemanfaatan Pelatihan Pemahaman Pengembangan Asset
 Sumber: Data Pengabdian Masyarakat tahun 2018

Sementara tingkat rata-rata kepuasan dimasing-masing item bisa dilihat dari *pie chart* berikut:



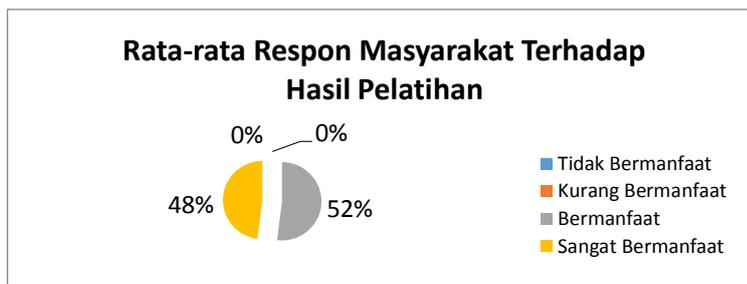
Gambar 6. Persentase Kemanfaatan Pelatihan pengembangan Asset
 Sumber: Data Pengabdian Masyarakat tahun 2018

Untuk penguatan kinerja organisasi dalam menangani partisipasi masyarakat disajikan bentuk *bar chart* berikut.



Gambar 7. Rincian Kemanfaatan Pelatihan penguatan program kerja

Sumber: Data Pengabdian Masyarakat tahun 2018



Gambar 8. Persentase Kemanfaatan Pelatihan penguatan Partisipasi

Sumber: Data Pengabdian Masyarakat tahun 2018



Gambar 9. Tim Inti Perencana Partisipatif saat membuat rancangan pemberdayaan

Sumber: Data Pengabdian Masyarakat tahun 2018



Gambar 10. Pelatihan peningkatan Kapasitas Masyarakat memanfaatkan kain perca

Sumber: Data Pengabdian Masyarakat tahun 2018

Program PNPM-MP nampaknya merupakan program yang bagi pengelolanya sendiri (BKM) merupakan sebuah program yang sangat berat (terbatasi oleh aturan yang sangat ketat) karena harus menuntut kerelawanan yang tinggi sebab tidak ada honor

yang melekat di dalamnya. Bahkan seringkali untuk pengelola tidak hanya mengeluarkan swadaya tenaga dan pikiran sebagai bentuk partisipasi, akan tetapi swadaya keuangan harus selalu terlihat sebagai pemodelan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya, baik tenaga, pikiran, maupun keuangan.

Sesungguhnya dalam pemberdayaan dengan prinsip partisipatif pastinya menuntut pelibatan secara penuh oleh semua pihak, karena menuntut kesukarelawanan. (Siswanto, 2016) menjelaskan dalam paradigma pembangunan manusia perlu menitik beratkan pada pelayanan sosial, pembelajaran sosial, pemberdayaan, kemampuan, dan juga kelembagaannya. Dalam hal ini para relawan yang tergabung dalam PKBKM pastinya sangat memahami betul tentang seluk beluk dari masyarakat sebagai subjek pemberdayaan. Konsep relawan mengarah pada kesediaan untuk memberi bantuan secara sukarela. Tuntutan kerelawanan yang ada pada Program KOTAKU hasil mutasi dari PNPM-MP sangat tinggi sehingga BKM dan juga KSM sangat memerlukan dukungan yang serius dari lembaga terkait terutama pemerintah desa untuk bersinergi dalam segala hal.

Publik figur yang ada di desa sebisa mungkin menjadi teladan bagi masyarakat sebagai proses pembelajaran sosial. (Asrori, 2018) memperjelas argumen tersebut dengan memastikan bahwasannya jika kita ingin berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat maka harus betul-betul melibatkan emosional dan mentalnya untuk mendorong kelompok guna mencapai tujuan dan tanggungjawab mereka.

Anggota BKM dalam menjalankan fungsinya sebagai penggerak pemberdayaan di masyarakat sangat tergantung pada persepsi yang mereka bangun. Keterlibatan mereka dalam berpartisipasi secara emosional dan mental memberikan penjernihan dalam mengaktualisasikan persepsi. Partisipasi yang telah diimplementasikan dengan baik di seluruh rangkaian kegiatan di PNPM-Mandiri Perkotaan membawa pada tergugahnya kembali nilai gotong-royong masyarakat.

Menurut pandangan Weber keberhasilan pemberdayaan sangat tergantung pada kesesuaian target dan alat untuk mencapainya. Gambaran para relawan dengan konsep dan pemahaman yang baik terhadap pemberdayaan partisipatif dan proses pencapaian tujuan pemberdayaan, membawa pada kemudahan dan kelancaran para pelaksana pemberdaya untuk menggerakkan potensi masyarakat lokal menuju pada keberdayaan.

wujud partisipasi swadaya baik materiil maupun imateriil yang terpola dengan baik mendorong terbentuknya kembali nilai gotong royong dalam masyarakat. Dengan terbangunnya kembali nilai gotong-royong dalam perspektif teori aksi bisa menjadi orientasi dan tujuan masyarakat dalam berinteraksi social (Ritzer, 2010).

“*Nek Kanane*” bisa menjadi alternative pendekatan pemberdayaan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai gotong royong masyarakat yang sudah lazim digunakan oleh masyarakat Pulotondo dalam program pemberdayaan. “*Nek Kanane*” merujuk pada sebuah sikap dan perilaku tanpa pamrih didasari jiwa ikhlas. Sehingga yang diharapkan tidak lain adalah balasan kelak di Akhirat. Dalam masyarakat religious seperti di Tulungagung, pendekatan ini sangat cocok diterapkan, mengingat dalam pandangan religi kehidupan akhirat adalah tujuan akhir dalam kehidupan. Sementara di dunia ini adalah tempat mencari bekal untuk menuju kesana. dengan begitu menjadikan pelaku pemberdayaan bisa memiliki sikap amanah dan kesadaran partisipatif. Tindakan ini menurut Weber disebut sebagai “*wertrational*” dalam konsep *the degree of rationality* yakni tindakan social dengan motif nilai-nilai yang tertanam dalam diri individu dan masyarakat.

Kesediaan sikap dan Kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi swadaya tenaga dan dana menggambarkan persepsi masyarakat terhadap pemberdayaan sangat positif dan dapat meningkatkan mutu pemberdayaan yang ada. Gordon W. Alport menjelaskan mengenai konsep partisipasi sebagai berikut. “*the person who participace is ego involved instead of merely task invilved*” (Asrori, 2018). Sementara (Suharto, 2014) sangat menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan karena menurutnya: “Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri karena tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan mereka sendiri. Tingkat kesadaran masyarakat merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan pemberdayaan juga melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif”. Sehingga dalam partisipasi Sastropoetro dalam (Asrori, 2018) menjelaskan unsur penting yang harus dilakukan, *pertama*, perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku yang diakibatkan oleh pengertian yang menumbuhkan kesadaran. *Kedua*, kesadaran yang didasarkan pada perhitungan dan pertimbangan. *Ketiga*, kesediaan

melakukan sesuatu yang tumbuh dari dalam lubuk sendiri tanpa dipaksa oleh orang lain. *Keempat*, adanya rasa tanggungjawab terhadap kepentingan bersama.

Mengingat mulai banyaknya anggota PKBKM yang mengalami kegalauan terhadap keberlanjutan program PNPM-MP yang telah bermutasi menjadi Program KOTAKU, maka penguatan Kapasitas Masyarakat dan juga mutu organisasi PKBKM perlu ditingkatkan dan hal tersebut bisa dilakukan dengan memberikan pembinaan atau pun pencerahan kembali tentunya dengan membangun persepsi "*Nek Kanane*".

Peningkatan kapasitas masyarakat dengan pendanaan dari pemerintah yang mengharuskan adanya relawan swadaya baik tenaga maupun dana perlu dikelola dengan amanah dan ikhlas. Persepsi positif "*Nek Kanane*" memiliki peranan yang penting terhadap kesuksesan pemberdayaan, sebab memberikan pengetahuan, meningkatkan pemahaman, dan juga memupuk sikap untuk sadar akan pentingnya memberdayakan potensi diri dan masyarakat sekitar, meskipun terkadang dirasakan berat tetapi pastinya menggugah kesadaran bergotong-royong. Kesadaran dan mental baik tersebut memberikan sinyal positif terhadap peningkatan kuantitas dan kualitas pemberdayaan, selain itu juga membangun kearifan lokal masyarakat dalam pemberdayaan berciri khas "*Nek Kanane*".

E. KESIMPULAN

Keputusan pemerintah menghentikan aliran pendanaan pemberdayaan PNPM-Mandiri Perkotaan menyisakan berbagai persoalan di tingkat bawah yakni Badan keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai relawan yang harus terus menjaga kelangsungan asset yang dimiliki. BKM mengalami kegelisahan dan penurunan semangat keorganisasian sementara di sisi lain KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) pemanfaat langsung dana pemberdayaan menjadi kurang terkontrol.

Mengingat keberhasilan pemberdayaan selama ini yang telah diraih, asset pemberdayaan berupa SDM, dana, dan bangunan yang ada rasanya menjadi sangat rugi dan memprihatinkan kalau tidak dikelola kembali dengan baik, sebab mampu memberikan banyak kemanfaatan bagi masyarakat desa terutama peningkatan perekonomian warga dengan ekonomi kreatifnya.

Pendampingan ini telah menghasilkan system baru pada pengembangan asset BKM dengan memvalidasi usulan KSM secara riil dan melakukan gruduk masal pada KSM penunggak, selain itu guna mendukung kegiatan sosial difasilitasi dengan program kambing gulir. Selain itu untuk membangun budaya partisipasi dan mutu organisasi dikembangkan pendekatan “*nek kanane*” sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat. Demi memperluas jaringan komunikasi dan akses masyarakat dibangun system informasi BKM-KOTAKU sekaligus berfungsi sebagai pelaporan keuangan dan kegiatan BKM

F. ACKNOWLEDGMENTS

Penulis ucapkan terimakasih kepada KEMENRISTEK DIKTI yang telah membiayai kegiatan ini dengan Program Kemitraan Masyarakat (PKM). Terimakasih juga diucapkan kepada mitra kegiatan yaitu BKM Wahana Sejahtera. Ucapan khusus juga diberikan kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat termasuk juga mahasiswa yang dengan penuh semangat berpartisipasi dalam pemberdayaan ini

G. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2013). *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Asrori, muhamad abdul roziq. (2018). Building Collective Awareness of Self-Help on the Empowerment of PNPM-MP, 5(4), 66–70. <https://doi.org/10.30845/jesp.v5n4p8>
- Chambers, R. (1995). *Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts? Uner Kirdar dan Leonard Silk (eds.), People: From Impoverishment to Empowerment*. New York: New York University Press.
- Rahayu, & Budi, A. (2010). *Pembangunan Perekonomian Nasional Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Semarang: MG.
- Ritzer, G. D. J. G. (2010). *Modern Sociological Theory*. Jakarta: Prenada Media.
- Sairin, S. (2002). *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia : Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siswanto, B. (2016). *Pemberdayaan Masyarakat*. Malang: Servaminora.
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Tri Winarni. (1998). *Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21 , Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*. Yogyakarta: Aditiya Media.